

BAB IV

Analisis Strategis Inggris melalui BWF dalam Mengembalikan Citra Inggris terhadap Indonesia Setelah Larangan Bertanding Atlet Badminton Indonesia

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap strategi *nation branding* Inggris terhadap Indonesia setelah peristiwa *All England* 2021 dengan menggunakan teori *nation branding*. Bab sebelumnya telah menjelaskan bagaimana kasus *All England* 2021 menimbulkan berbagai respons dari pemerintah, media, atlet, dan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap citra Inggris di Indonesia. Kontroversi yang muncul akibat pengunduran tim bulu tangkis Indonesia dari turnamen tersebut memunculkan persepsi negatif yang berkaitan dengan aspek keadilan, transparansi, dan profesionalisme penyelenggaraan event olahraga internasional.⁶⁰ Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Inggris karena berpotensi memengaruhi *nation brand* yang selama ini dibangun melalui berbagai sektor, termasuk olahraga.

Dalam perspektif *nation branding*, citra suatu negara tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami perubahan akibat berbagai peristiwa yang mendapatkan perhatian publik internasional. Oleh karena itu, ketika sebuah negara menghadapi krisis reputasi, diperlukan berbagai upaya untuk mempertahankan, memulihkan, dan mengelola persepsi publik agar citra negara tetap terjaga.⁶¹

⁶⁰ Maria Helen Oktavia, "The Absence of Indonesia in 2021 All England Open," *KOMPAS.com* (Kompas.com, March 23, 2021), last modified March 23, 2021, diakses pada 18 mei, 2026, <https://go.kompas.com/read/2021/03/23/140643474/the-absence-of-indonesia-in-2021-all-england-open>.

⁶¹ Simon Anholt, *Competitive Identity : The New Brand Management for Nations, Cities and Regions* (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 1–23.

Menurut Simon Anholt, *nation branding* tidak hanya berkaitan dengan promosi citra positif suatu negara, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dalam merespons tantangan yang dapat memengaruhi reputasinya di mata masyarakat internasional. Dalam konteks kasus *All England* 2021, berbagai pihak yang terkait dengan Inggris, seperti Badminton England, Badminton World Federation (BWF), serta otoritas kesehatan Inggris, melakukan sejumlah langkah untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dan mengurangi dampak negatif yang muncul di tengah publik Indonesia.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, bab ini akan menganalisis berbagai upaya *nation branding* yang dilakukan Inggris pasca munculnya kontroversi *All England* 2021. Analisis difokuskan pada strategi komunikasi krisis, penegasan nilai *rule of law*, transparansi informasi, serta pemanfaatan diplomasi olahraga sebagai instrumen untuk mempertahankan citra Inggris di mata masyarakat Indonesia.⁶³

Berikut terdapat berbagai dampak yang dihasilkan pada kasus *All England* 2021.

4.1 Dampak Terhadap Hubungan Bilateral Inggris-Indonesia

Insiden *All England* 2021 terjadi pada momentum yang sangat krusial bagi arsitektur hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Britania Raya (Inggris). Pada tahun 2021, Inggris sedang berada dalam fase krusial implementasi doktrin politik luar negeri "*Global Britain*" pasca-Brexit, di mana kawasan Indo-Pasifik dengan Indonesia sebagai episentrum ekonomi ASEAN menjadi prioritas utama dalam diversifikasi kemitraan strategis mereka.⁶⁴ Di sisi

⁶² Simon Anholt, *Places* (Palgrave Macmillan, 2009), 1–15.

⁶³ Stuart Murray, *Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practice* (Routledge, 2018), 85–102.

⁶⁴ Louisa Brooke-Holland, *Integrated Review 2021: The Defence Tilt to the Indo-Pacific* (London: House of Commons Library, 2021), 4–8.

lain, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat membutuhkan stabilitas hubungan internasional untuk mengamankan jalur pasokan kesehatan dan investasi demi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Meskipun mendiskualifikasi tim bulu tangkis Indonesia sempat memicu gelombang sentimen negatif yang masif di tingkat publik, dampak konkret terhadap hubungan bilateral kedua negara secara struktural dapat dianalisis melalui empat dimensi utama berikut:

4.1.1 Aktivasi Diplomasi Perlindungan Warga Negara (crisis diplomacy)

Dampak langsung yang pertama adalah reposisi prioritas diplomatik luar negeri Indonesia yang secara agresif menerapkan fungsi perlindungan warga negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, segera melakukan koordinasi tingkat tinggi dan menginstruksikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London untuk melakukan intervensi langsung terhadap pemerintah Inggris.⁶⁵ Pemerintah Indonesia memandang bahwa ada kelalaian dari pihak penyelenggara (Badminton England) dan BWF yang tidak mampu membangun sistem *bubble* yang aman, serta adanya ketidakadilan dalam penerapan protokol pertandingan.

Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, langsung bergerak melakukan diplomasi krisis (*crisis diplomacy*). Desra menghubungi Direktur Jenderal Asia-Pasifik di Kementerian Luar Negeri Inggris

⁶⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, "Langkah-Langkah Diplomasi KBRI London Terhadap Insiden All England 2021," *Laporan Tahunan KBRI London 2021* (London: KBRI, 2022), hlm. 45.

(Foreign, Commonwealth & Development Office / FCDO) untuk memprotes perlakuan tidak adil yang diterima atlet Indonesia, serta menuntut intervensi politik agar tim Indonesia diizinkan melakukan tes PCR ulang.⁶⁶ Melalui diplomasi ini, Indonesia menegaskan bahwa negara hadir secara penuh untuk membela hak-hak aktor non-negara (atlet) yang membawa nama baik bendera nasional di luar negeri.

4.1.2 Komitmen Diplomasi Kesehatan: Keberlanjutan Jalur Vaksin

AstraZeneca

Salah satu dampak paling sensitif yang berhasil dimitigasi adalah keberlangsungan kerja sama kesehatan. Pada saat insiden terjadi, Inggris merupakan salah satu mitra strategis utama Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 nasional melalui jalur bilateral maupun multilateral (fasilitas COVAX).⁶⁷

Kedua pemerintah berhasil menerapkan strategi pemisahan isu (*decoupling*) antara friksi olahraga di Birmingham dengan kepentingan kemanusiaan yang lebih makro. Dampaknya, komitmen pengiriman jutaan dosis vaksin AstraZeneca dari Inggris ke Indonesia sepanjang tahun 2021 sama sekali tidak terganggu.⁶⁸ Hal ini membuktikan bahwa pragmatisme

⁶⁶ Miranti Kencana Wirawan, "Dubes RI untuk Inggris Desra Percaya Protes Keras ke FCDO dan BWF Terkait All England," *Kompas.com*, 18 Maret 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/18/164741370/dubes-ri-untuk-inggris-desra-percaya-protes-keras-ke-fcdo-dan-BWF-terkait>. Diakses pada 9 mei 2026

⁶⁷ Bernadette Aderi Puspaningrum, "Indonesia Terima Jutaan Dosis Vaksin AstraZeneca dari Komitmen Hubungan Bilateral dengan Inggris," *Kompas.com*, 19 Agustus 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/19/183000970/indonesia-terima-jutaan-dosis-vaksin-astrazeneca-dari-komitmen-hubungan>. Diakses pada 9 mei 2026

⁶⁸ Aria, "Assistance through 134,560 Vaccine Doses from UK Arrive in Indonesia," *Antara News* (ANTARA, November 3, 2021), last modified November 3, 2021, diakses pada Juni 12, 2026, <https://en.antaranews.com/news/197429/assistance-through-134560-vaccine-doses-from-uk-arrive-in-indonesia?>.

kepentingan strategis jangka panjang mampu mengesampingkan riak diplomatik jangka pendek.

4.1.3 Sinkronisasi Agenda Multilateral: Menjelang COP26 dan Presidensi G20

Tahun 2021 merupakan tahun diplomasi multilateral yang padat, di mana Inggris bertindak sebagai tuan rumah KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, sementara Indonesia tengah bersiap memegang Presidensi G20. Inggris sangat membutuhkan dukungan politik dan komitmen lingkungan dari Indonesia selaku salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar dunia demi menyukseskan target-target kesepakatan iklim global.⁶⁹

Keberhasilan meredam isu *All England* secara elegan memastikan koordinasi bilateral menjelang COP26 tetap solid. Presiden Joko Widodo tetap menghadiri KTT Glasgow secara langsung pada November 2021 dan melangsungkan pertemuan tatap muka yang produktif dengan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, guna membahas implementasi transisi energi hijau.⁷⁰

Berikut terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Inggris terhadap Indonesia seperti strategi komunikasi krisis, penegasan nilai *rule*

⁶⁹ Prime Minister's Office, "PM Meeting with Indonesian President Joko Widodo: 1 November 2021," GOV.UK, November 1, 2021. <https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-indonesian-president-joko-widodo-1-november-2021>

⁷⁰ Ego Syahril, "Pertemuan Jokowi-Boris Johnson di COP26: Inggris Komitmen Danai Transisi Energi Hijau RI," *Tempo.co*, 2 November 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1523910/pertemuan-jokowi-boris-johnson-di-cop26-inggris-komitmen-danai-transisi-energi-hijau-ri>.

of law, transparansi institusi, *sport diplomacy*, dan pemeliharaan reputasi internasional.

4.2 Strategi Komunikasi Krisis Inggris dalam Kasus *All England* 2021

Dalam konteks *nation branding*, komunikasi krisis merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan negara maupun institusi untuk mempertahankan reputasi ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan citra negatif. Menurut Timothy Coombs, komunikasi krisis merupakan upaya organisasi untuk memberikan informasi, menjelaskan situasi, serta mengurangi dampak reputasional yang muncul akibat suatu krisis. Dalam kasus *All England* 2021, kontroversi mengenai pengunduran tim Indonesia berpotensi memengaruhi citra Inggris sebagai negara yang dikenal memiliki tata kelola olahraga yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Oleh karena itu, berbagai pihak yang terlibat berupaya melakukan komunikasi krisis guna menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa tersebut kepada publik internasional.

Strategi komunikasi krisis pertama yang dilakukan adalah pemberian klarifikasi resmi kepada publik. Setelah tim Indonesia dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan, Badminton England segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan berasal dari penyelenggara turnamen, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan National Health Service (NHS) Test and Trace yang berlaku di Inggris selama pandemi COVID-19. Dalam pernyataan tersebut, Badminton England

menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan instruksi yang diberikan oleh otoritas kesehatan Inggris.⁷¹

Pemerintah Inggris sangat menyadari bahwa sentimen anti-Inggris yang meluas di ruang digital Indonesia dapat mengancam agenda kerja sama ekonomi ekonomi yang sedang diinisiasi. Oleh karena itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, segera merilis klarifikasi resmi yang menegaskan bahwa tindakan *National Health Service* (NHS) bersifat independen, non-politis, dan berlaku sama bagi semua warga negara demi hukum keselamatan publik.⁷²

Selain Badminton England, *Badminton World Federation* (BWF) juga melakukan komunikasi krisis melalui berbagai saluran resmi. *Badminton World Federation* menyampaikan bahwa keputusan yang menyebabkan tim Indonesia harus mengundurkan diri tidak berkaitan dengan aspek teknis pertandingan, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan regulasi kesehatan nasional Inggris. Melalui pernyataan tersebut, *Badminton World Federation* berupaya menjelaskan kepada publik bahwa keputusan yang diambil bukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap Indonesia, melainkan penerapan aturan kesehatan yang berlaku bagi seluruh individu yang berada di wilayah Inggris.⁷³

Langkah tanggap ini berhasil meredam potensi boikot ekonomi atau hambatan psikologis dalam kerja sama perdagangan. Dampaknya, agenda-agenda

⁷¹ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 10–13.

⁷² Widhyasmaramurti, Akhmad Alfian Rahadi, dan Poetrena Oneal, "Indonesia's Dispute Resolution in All England 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 14–18.

⁷³ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 10–14.

besar yang sedang berjalan pada tahun 2021 tetap terealisasi, termasuk pertemuan *Joint Economic and Trade Committee* (JETCO) yang membahas penguatan komitmen investasi Inggris di sektor energi terbarukan, digitalisasi, dan infrastruktur hijau di Indonesia.⁷⁴

Strategi kedua adalah penekanan terhadap prinsip *rule of law* atau supremasi hukum. Dalam berbagai pernyataan yang disampaikan kepada media, penyelenggara dan otoritas terkait menekankan bahwa seluruh peserta turnamen wajib mematuhi regulasi kesehatan yang ditetapkan pemerintah Inggris. Penekanan terhadap aspek ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan politik maupun diskriminasi terhadap negara tertentu, tetapi merupakan implementasi kebijakan kesehatan yang berlaku secara nasional.⁷⁵ Dengan demikian, Inggris berupaya mempertahankan citranya sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan menerapkan aturan secara konsisten.

Strategi ketiga adalah penggunaan media massa dan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Badminton England dan *Badminton World Federation* memanfaatkan situs web resmi, media sosial, serta konferensi pers untuk menyampaikan informasi terkait kronologi kasus *All England* 2021. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat dan memberikan penjelasan langsung kepada publik internasional. Dalam teori komunikasi krisis, keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor

⁷⁴ Rizki Anugerah, "Diplomasi Vaksin dan Dampak Isu All England terhadap Hubungan Indonesia-Inggris," *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 8, no. 1 (2022): 28.

⁷⁵ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 10–13.

penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang sedang menghadapi krisis reputasi.⁷⁶

Di samping itu, komunikasi krisis juga dilakukan melalui pendekatan diplomatik. Pemerintah Inggris tidak secara langsung terlibat dalam polemik yang berkembang di media sosial, namun tetap memberikan ruang bagi penyelenggara dan otoritas kesehatan untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan tersebut. Sementara itu, komunikasi antara pemerintah Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, *Badminton World Federation*, dan penyelenggara turnamen terus dilakukan untuk memperoleh klarifikasi mengenai peristiwa yang terjadi. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk mengelola dampak diplomatik yang muncul akibat kontroversi tersebut.⁷⁷

Melalui berbagai strategi komunikasi krisis tersebut, Inggris berupaya mempertahankan reputasinya sebagai negara yang profesional dan taat terhadap hukum. Meskipun kritik dari masyarakat Indonesia tetap muncul, komunikasi yang dilakukan oleh Badminton England, *Badminton World Federation*, dan otoritas terkait menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi dampak negatif terhadap citra Inggris. Dalam perspektif *nation branding*, strategi komunikasi krisis ini merupakan bentuk perlindungan terhadap reputasi negara agar nilai-nilai yang selama ini melekat pada identitas Inggris, seperti profesionalisme, transparansi, dan *rule of law*, tetap dapat dipertahankan di tengah kontroversi yang terjadi.

⁷⁶ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 1–24.

⁷⁷ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 14–18.

4.3 Penegasan Nilai *rule of law*

Salah satu upaya yang dilakukan Inggris dalam merespons kontroversi *All England* 2021 adalah menegaskan nilai *rule of law* sebagai prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan terkait pengunduran tim Indonesia dari turnamen. Dalam perspektif *nation branding*, nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara merupakan bagian penting dari identitas nasional yang ingin ditampilkan kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, ketika muncul tuduhan mengenai ketidakadilan dan diskriminasi terhadap tim Indonesia, pihak-pihak yang terlibat berupaya menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan implementasi hukum yang berlaku dan bukan tindakan yang ditujukan kepada negara tertentu.

Menurut peraturan *Badminton World Federation* “All participants must expect that BWF rules will apply around restricted movement of participants to ensure minimum contact with people not tested and without a “Green Accreditation”. Any breach of the BWF guidelines and protocols can mean that accreditations are revoked, and participants not allowed to enter the venue and participate in the tournament.”⁷⁸

Penegasan nilai *rule of law* terlihat melalui berbagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh Badminton England dan Badminton World Federation (BWF). Dalam klarifikasinya, BWF menegaskan bahwa keputusan yang mewajibkan tim Indonesia menjalani isolasi mandiri selama sepuluh hari sepenuhnya berasal dari instruksi *National Health Service (NHS) Test and Trace* Inggris. BWF dan Badminton England menyatakan bahwa mereka tidak memiliki

⁷⁸ BWF, “Revised HSBC BWF World Tour Calendar,” *Bwfmedia*, terakhir diubah 2024, diakses Juli 23, 2026, <https://corporate.bwfbadminton.com/news-single/2020/08/27/revised-hsbc-bwf-world-tour-calendar/>.

kewenangan untuk mengabaikan ataupun mengubah keputusan tersebut karena kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi nasional Inggris yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷⁹

Badminton England juga menegaskan bahwa setiap individu yang menerima pemberitahuan dari *NHS Test and Trace* memiliki kewajiban hukum untuk menjalani isolasi mandiri sesuai ketentuan pemerintah Inggris. Sebagai penyelenggara turnamen, Badminton England menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain memastikan seluruh peserta yang menerima pemberitahuan tersebut mematuhi aturan yang berlaku.⁸⁰ Pernyataan ini menunjukkan upaya untuk menegaskan bahwa penyelenggara bertindak berdasarkan kewajiban hukum dan bukan atas dasar pertimbangan subjektif maupun diskriminatif.

Selain itu, pihak pemerintah Inggris melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa seluruh pelancong yang memasuki wilayah Inggris selama pandemi COVID-19 wajib tunduk pada protokol perlindungan kesehatan yang diterapkan untuk melindungi masyarakat Inggris. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa keputusan isolasi terhadap atlet yang terdampak didasarkan pada rekomendasi ahli kesehatan dan bertujuan menjaga keselamatan seluruh peserta turnamen serta masyarakat luas.⁸¹ Dengan demikian, pemerintah berusaha menunjukkan bahwa

⁷⁹ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 10–14.

⁸⁰ Widhyasmaramurti, Poetrena Oneal, and Alfian Rahadi, "INDONESIA'S DISPUTE RESOLUTION in ALL ENGLAND 2021," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 6, no. 1 (2021): 10–13.

⁸¹ Tatang Guritno, "Kedubes Inggris Sebut Aturan Isolasi di All England Diterapkan Secara Adil dan Berlaku untuk Semua," *Kompas.com*, 18 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/14493391/kedubes-inggris-sebut-aturan-isolasi-di-all-england-diterapkan-secara-adil>. Diakses pada 29 mei 2026.

kebijakan tersebut merupakan bentuk penerapan hukum yang berlaku secara universal tanpa memandang asal negara peserta.

Dalam konteks *nation branding*, penegasan nilai *rule of law* menjadi penting karena selama ini Inggris dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan konsistensi dalam penerapan aturan. Melalui berbagai klarifikasi yang disampaikan, Inggris berusaha mempertahankan citranya sebagai negara yang mengutamakan kepastian hukum, bahkan ketika keputusan yang diambil menimbulkan kontroversi dan kritik dari publik internasional. Upaya ini juga bertujuan mengurangi persepsi bahwa pengunduran tim Indonesia merupakan tindakan yang dilandasi diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap negara tertentu.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penegasan nilai *rule of law* merupakan salah satu strategi yang digunakan Inggris untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya di tengah krisis. Melalui penekanan bahwa keputusan yang diambil merupakan konsekuensi dari regulasi nasional yang berlaku, Inggris berupaya mempertahankan identitasnya sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum dan menerapkan aturan secara konsisten. Dalam perspektif *nation branding*, langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik internasional terhadap tata kelola pemerintahan dan institusi Inggris.

4.4 Transparansi Institusi

Dalam menghadapi krisis reputasi yang muncul akibat kasus *All England* 2021, transparansi institusi menjadi salah satu aspek penting yang digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mempertahankan citra Inggris di mata publik

internasional. Dalam konteks *nation branding*, transparansi merupakan elemen yang berhubungan erat dengan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi suatu negara. Semakin terbuka suatu institusi dalam menyampaikan informasi dan menjelaskan alasan di balik suatu kebijakan, semakin besar peluang bagi negara tersebut untuk mempertahankan reputasinya di tengah situasi krisis.

Setelah muncul berbagai kritik dari pemerintah Indonesia, atlet, maupun masyarakat Indonesia, *Badminton England* dan *Badminton World Federation* (BWF) berupaya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan yang menyebabkan tim Indonesia harus mengundurkan diri dari turnamen. Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs web dan media sosial, kedua institusi tersebut menjelaskan kronologi kejadian, dasar hukum yang digunakan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.⁸² Langkah tersebut merupakan bentuk transparansi informasi yang bertujuan mengurangi kesalahpahaman dan spekulasi yang berkembang di ruang publik.

BWF secara khusus menjelaskan bahwa keputusan terkait isolasi mandiri terhadap atlet Indonesia bukan merupakan keputusan organisasi, melainkan hasil dari sistem *NHS Test and Trace* yang dijalankan oleh otoritas kesehatan Inggris. Dalam penjelasannya, BWF menyampaikan bahwa pihak penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah instruksi yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan.⁸³ Melalui penjelasan tersebut, BWF berusaha menunjukkan kepada publik bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan

⁸² Badminton World Federation, "BWF Official Statement: TotalEnergies BWF All England Open 2021 Update," BWF Badminton, 20 Maret 2021, <https://corporate.BWFbadminton.com/news-single/2021/03/20/BWF-official-statement-all-england-open-2021>. Diakses pada 29 mei 2026

⁸³ Muhammad Labib, "BWF Sebut Aturan NHS Inggris Mutlak, Tak Bisa Diganggu Gugat," *Kompas.com*, 18 Maret 2021, <https://www.kompas.com/sports/read/2021/03/18/11200058/BWF-sebut-aturan-nhs-inggris-mutlak-tak-bisa-diganggu-gugat>. Diakses pada 29 mei 2026

berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan bukan atas pertimbangan subjektif.

Transparansi juga ditunjukkan melalui penyampaian informasi mengenai komunikasi yang dilakukan antara penyelenggara turnamen, *BWF*, dan otoritas kesehatan Inggris. Dalam berbagai pernyataan resmi, dijelaskan bahwa setelah menerima pemberitahuan dari *NHS Test and Trace*, penyelenggara segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai langkah yang harus diambil terhadap atlet yang terdampak.⁸⁴ Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil koordinasi antarinstansi dan bukan tindakan sepihak dari penyelenggara turnamen.

Selain melalui pernyataan resmi, transparansi institusi juga terlihat dari upaya *BWF* untuk memberikan klarifikasi tambahan kepada publik setelah muncul berbagai pertanyaan mengenai konsistensi penerapan aturan kesehatan selama turnamen. *BWF* menerbitkan sejumlah penjelasan lanjutan yang memuat informasi mengenai prosedur kesehatan yang berlaku, mekanisme pelacakan kontak, serta alasan mengapa peserta yang menerima notifikasi dari *NHS Test and Trace* harus mengikuti masa isolasi mandiri.⁸⁵ Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

Dalam perspektif *nation branding*, transparansi institusi memiliki peran penting karena dapat memperkuat dimensi *governance* yang dikemukakan oleh

⁸⁴ Badminton England, "Joint Statement: *BWF* and Badminton England on YONEX All England Open Badminton Championships 2021," Badminton England, 18 Maret 2021, <https://www.badmintonengland.co.uk/news/joint-statement-BWF-and-badminton-england/>. Diakses pada 29 mei 2026

⁸⁵ Badminton World Federation, "*BWF* Statement on Withdrawal of Turkish and Indonesian Players," *BWF Badminton*, 18 Maret 2021, <https://corporate.BWfbadminton.com/news-single/2021/03/18/BWF-statement-on-withdrawal-of-turkish-and-indonesian-players>. Diakses pada 29 mei 2026

Simon Anholt. Dimensi ini berkaitan dengan persepsi masyarakat internasional terhadap kualitas tata kelola suatu negara, termasuk aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap institusi publik. Melalui berbagai klarifikasi yang disampaikan selama kasus *All England* 2021, institusi-institusi yang terkait dengan Inggris berupaya mempertahankan citra negara sebagai negara yang memiliki tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁶

Meskipun transparansi yang dilakukan tidak sepenuhnya menghilangkan kritik dari masyarakat Indonesia, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengelola persepsi publik dan mengurangi dampak negatif terhadap reputasi Inggris. Dengan memberikan informasi secara terbuka mengenai proses pengambilan keputusan dan dasar hukum yang digunakan, Inggris berupaya mempertahankan kepercayaan publik internasional terhadap institusi-institusinya. Oleh karena itu, transparansi institusi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya *nation branding* yang dilakukan untuk menjaga citra Inggris di tengah kontroversi *All England* 2021.

4.5 Sport Diplomacy sebagai Upaya Nation branding Inggris

Diplomasi olahraga (*sport diplomacy*) merupakan salah satu instrumen *soft power* yang digunakan negara untuk membangun hubungan internasional, memperkuat citra nasional, serta meningkatkan pemahaman dan kerja sama antarnegara melalui kegiatan olahraga. Dalam konteks *nation branding*, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana kompetisi, tetapi juga sebagai media untuk mempromosikan nilai-nilai, budaya, dan identitas suatu negara kepada masyarakat

⁸⁶ Simon Anholt, *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), 25–26.

internasional. Menurut Stuart Murray, diplomasi olahraga merupakan penggunaan olahraga oleh aktor negara maupun non-negara untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperkuat hubungan internasional yang positif.⁸⁷

Dalam kasus *All England* 2021, kontroversi yang muncul akibat pengunduran tim Indonesia berpotensi memberikan dampak negatif terhadap citra Inggris sebagai salah satu pusat olahraga dunia. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan bulu tangkis internasional, Inggris memiliki kepentingan untuk mempertahankan reputasinya sebagai penyelenggara kompetisi olahraga yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, berbagai aktivitas diplomasi olahraga yang telah lama dilakukan Inggris menjadi instrumen penting dalam menjaga nation brand negara tersebut di tengah krisis yang terjadi.

Salah satu bentuk diplomasi olahraga Inggris terlihat melalui penyelenggaraan turnamen *All England* sebagai ajang olahraga internasional yang mempertemukan atlet dari berbagai negara. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1899, *All England* telah berkembang menjadi salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia dan menjadi simbol kontribusi Inggris terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis global.⁸⁸ Melalui penyelenggaraan turnamen tersebut, Inggris tidak hanya mempromosikan olahraga, tetapi juga memperkuat citranya sebagai negara yang mendukung kerja sama internasional dan pertukaran budaya melalui olahraga.

Pasca munculnya kontroversi *All England* 2021, diplomasi olahraga juga tercermin melalui upaya mempertahankan hubungan baik dengan komunitas bulu

⁸⁷ Stuart Murray, *Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practice* (London: Routledge, 2018), 5–8.

⁸⁸ Colin Clews, *The History of Badminton: From its Origins to the Modern Day* (London: The Badminton Association of England, 2015), 18–20.

tangkis internasional, termasuk Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama bulu tangkis dunia. Meskipun terjadi ketegangan akibat keputusan pengunduran tim Indonesia, komunikasi antara berbagai pihak tetap berlangsung melalui saluran organisasi olahraga internasional, seperti Badminton World Federation (BWF), Badminton England, dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).⁸⁹ Keberlanjutan komunikasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mencegah agar kontroversi yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas dalam hubungan olahraga internasional.

Selain itu, Inggris juga berupaya mempertahankan reputasinya melalui keberlanjutan penyelenggaraan berbagai ajang olahraga internasional setelah pandemi COVID-19. Kesuksesan Inggris dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga berskala global, seperti turnamen tenis Wimbledon, Liga Primer Inggris (*Premier League*), dan berbagai kejuaraan internasional lainnya, menjadi bagian dari diplomasi olahraga yang memperkuat citra negara sebagai tuan rumah yang kompeten dan profesional.⁹⁰ Reputasi yang telah dibangun melalui berbagai event olahraga tersebut membantu Inggris mempertahankan daya tarik dan kredibilitasnya meskipun menghadapi kritik dalam kasus *All England* 2021.

Dalam perspektif *nation branding*, diplomasi olahraga yang dilakukan Inggris juga berkaitan dengan upaya mempertahankan dimensi *culture and heritage* serta *people* dalam Nation Brand Hexagon yang dikemukakan oleh Simon Anholt. Olahraga telah menjadi bagian dari identitas budaya Inggris dan

⁸⁹ Badminton World Federation, "Official Letter of Apology from BWF President Poul-Erik Høyer to the People of Indonesia," BWF Badminton, 22 Maret 2021, <https://corporate.BWFbadminton.com/news-single/2021/03/22/official-letter-of-apology>. Diakses pada 30 mei 2026.

⁹⁰ J. Simon Rofo, "Sport Diplomacy and the Post-Pandemic Landscape: The United Kingdom's Major Event Strategy," *Diplomacy & Statecraft* 33, no. 3 (2022): 522.

berkontribusi terhadap persepsi internasional mengenai profesionalisme, sportivitas, dan keterbukaan masyarakat Inggris. Oleh karena itu, menjaga keberlangsungan hubungan olahraga internasional menjadi penting untuk mempertahankan citra positif yang telah dibangun selama bertahun-tahun.⁹¹

Dengan demikian, diplomasi olahraga dapat dipahami sebagai salah satu upaya *nation branding* yang dilakukan Inggris dalam menghadapi dampak reputasional akibat kasus *All England* 2021. Melalui penyelenggaraan event olahraga internasional, pemeliharaan hubungan dengan komunitas olahraga global, serta promosi nilai-nilai sportivitas dan kerja sama internasional, Inggris berupaya mempertahankan citranya sebagai negara yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan olahraga dunia. Meskipun kontroversi *All England* 2021 menimbulkan kritik dari masyarakat Indonesia, diplomasi olahraga menjadi instrumen penting dalam menjaga reputasi dan kredibilitas Inggris di tingkat internasional.

4.6 Pemeliharaan Reputasi Internasional sebagai Upaya *Nation branding* Inggris

Reputasi internasional merupakan salah satu aset penting dalam *nation branding* karena menentukan bagaimana suatu negara dipersepsikan oleh masyarakat internasional. Menurut Simon Anholt, reputasi negara dibangun melalui akumulasi persepsi yang terbentuk dari kebijakan pemerintah, perilaku institusi, budaya, masyarakat, dan interaksi negara tersebut dengan komunitas global. Oleh karena itu, ketika suatu negara menghadapi krisis yang berpotensi

⁹¹ Simon Anholt, *Places: Identity, Image and Reputation* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 32–35.

merusak citranya, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan reputasi yang telah dibangun.⁹²

Dalam kasus *All England* 2021, kontroversi yang muncul akibat pengunduran tim Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi Inggris, khususnya di mata masyarakat Indonesia. Kritik yang berkembang tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara turnamen dan BWF, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi terhadap Inggris sebagai negara yang selama ini dikenal menjunjung tinggi profesionalisme, keadilan, dan tata kelola yang baik. Menyadari adanya risiko tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan Inggris berupaya melakukan langkah-langkah yang bertujuan mempertahankan kredibilitas dan reputasi internasional negara tersebut.

Salah satu upaya pemeliharaan reputasi internasional dilakukan melalui konsistensi narasi yang disampaikan kepada publik. Badminton England, BWF, dan otoritas kesehatan Inggris secara konsisten menegaskan bahwa keputusan yang menyebabkan tim Indonesia tidak dapat melanjutkan pertandingan merupakan konsekuensi dari kebijakan kesehatan nasional yang berlaku selama pandemi COVID-19.⁹³ Konsistensi pesan ini penting dalam manajemen reputasi karena dapat mengurangi munculnya informasi yang saling bertentangan dan membantu membangun pemahaman yang lebih jelas mengenai alasan di balik keputusan yang diambil.

⁹² Simon Anholt, *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), 1–5.

⁹³ Badminton England, "Joint Statement: BWF and Badminton England on YONEX All England Open Badminton Championships 2021," Badminton England, 18 Maret 2021, <https://www.badmintonengland.co.uk/news/joint-statement-BWF-and-badminton-england/>. Diakses pada 30 mei 2026

Selain itu, pemeliharaan reputasi juga dilakukan melalui perlindungan terhadap kredibilitas institusi yang terlibat. Dalam berbagai pernyataan resmi, Badminton England dan BWF berusaha menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan koordinasi dengan otoritas kesehatan Inggris.⁹⁴ Langkah tersebut bertujuan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi olahraga Inggris serta menunjukkan bahwa penyelenggaraan turnamen tetap mengedepankan standar profesional yang tinggi meskipun berada dalam situasi pandemi.

Upaya pemeliharaan reputasi internasional juga terlihat melalui keberlanjutan penyelenggaraan berbagai ajang olahraga internasional di Inggris setelah terjadinya kontroversi *All England* 2021. Inggris tetap menjadi tuan rumah sejumlah kompetisi olahraga bergengsi yang melibatkan partisipasi atlet dari berbagai negara. Keberhasilan penyelenggaraan event-event tersebut menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa Inggris tetap memiliki kapasitas, pengalaman, dan kredibilitas dalam mengelola kompetisi internasional sesuai standar global.⁹⁵ Dengan demikian, reputasi yang sempat menghadapi tantangan akibat kasus *All England* dapat dipertahankan melalui rekam jejak positif yang terus dibangun.

Lebih lanjut, pemeliharaan reputasi internasional juga didukung oleh kekuatan nation brand Inggris yang telah terbentuk melalui berbagai sektor lain, seperti pendidikan, budaya, pariwisata, diplomasi, dan ekonomi. Dalam teori *nation branding*, reputasi negara tidak hanya ditentukan oleh satu peristiwa tertentu, tetapi merupakan hasil dari berbagai pengalaman dan persepsi yang

⁹⁴ Badminton World Federation, "BWF Official Statement: TotalEnergies BWF All England Open 2021 Update," BWF Badminton, 20 Maret 2021, <https://corporate.BWFbadminton.com/news-single/2021/03/20/BWF-official-statement-all-england-open-2021>. Diakses pada 30 mei 2026

⁹⁵ Department for Culture, Media and Sport, *Gold Framework: UK Strategy for Attracting and Delivering Major Sporting Events* (London: HM Government, 2022), 18–22.

terakumulasi dalam jangka panjang.⁹⁶ Oleh karena itu, meskipun kasus *All England* 2021 menimbulkan sentimen negatif di kalangan sebagian masyarakat Indonesia, reputasi internasional Inggris secara keseluruhan tetap ditopang oleh berbagai sumber daya reputasional yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pemeliharaan reputasi internasional menjadi salah satu upaya *nation branding* yang dilakukan Inggris dalam menghadapi dampak kontroversi *All England* 2021. Melalui konsistensi komunikasi, perlindungan kredibilitas institusi, keberlanjutan penyelenggaraan event internasional, serta pemanfaatan kekuatan reputasi yang telah dimiliki, Inggris berupaya mempertahankan citranya sebagai negara yang profesional, terpercaya, dan memiliki tata kelola yang baik di mata masyarakat internasional.

4.7 Analisis Dampak terhadap *Nation Brand* Inggris

Berdasarkan uraian sebelumnya, kasus *All England* 2021 dapat dikategorikan sebagai **krisis reputasi terbatas** bagi Inggris. Dampak paling jelas terlihat pada persepsi terhadap aspek penyelenggaraan olahraga, terutama mengenai *fairness*, transparansi, dan konsistensi penerapan aturan.

Akan tetapi, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa kasus tersebut menyebabkan jatuhnya *nation brand* Inggris secara keseluruhan. Kesimpulan tersebut penting karena *nation branding* merupakan konsep yang jauh lebih luas dibandingkan citra sebuah turnamen olahraga.

⁹⁶ Keith Dinnie, *Nation Branding: Concepts, Issues, Practice*, edisi ke-2 (London: Routledge, 2016), 42–45.

Kasus All England memang menciptakan sentimen negatif dalam jangka pendek, tetapi perkembangan hubungan Indonesia-Inggris menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak berkembang menjadi kerusakan hubungan bilateral. Forum bilateral tetap berjalan, kerja sama ekonomi tetap dikembangkan, kerja sama kesehatan tetap berlangsung, dan hubungan politik tingkat tinggi tetap dipertahankan.⁹⁷

Dengan demikian, upaya Inggris dapat dipahami bukan sebagai usaha untuk menghapus seluruh persepsi negatif, melainkan sebagai **upaya membatasi dan** mengelola dampak reputasional agar kontroversi olahraga tidak memengaruhi keseluruhan hubungan Inggris dengan Indonesia.

Hal tersebut juga menunjukkan pentingnya kemampuan suatu negara dalam melakukan *reputation management*. Ketika sebuah peristiwa negatif terjadi, negara tidak selalu dapat menghilangkan persepsi negatif tersebut secara langsung. Namun, negara dapat mengurangi dampaknya dengan mempertahankan hubungan positif dalam sektor lain. Dalam konteks penelitian ini, keberlanjutan hubungan Indonesia-Inggris menjadi indikator bahwa dampak All England 2021 bersifat spesifik dan terbatas, terutama pada persepsi publik mengenai olahraga, bukan kehancuran terhadap citra Inggris secara keseluruhan.

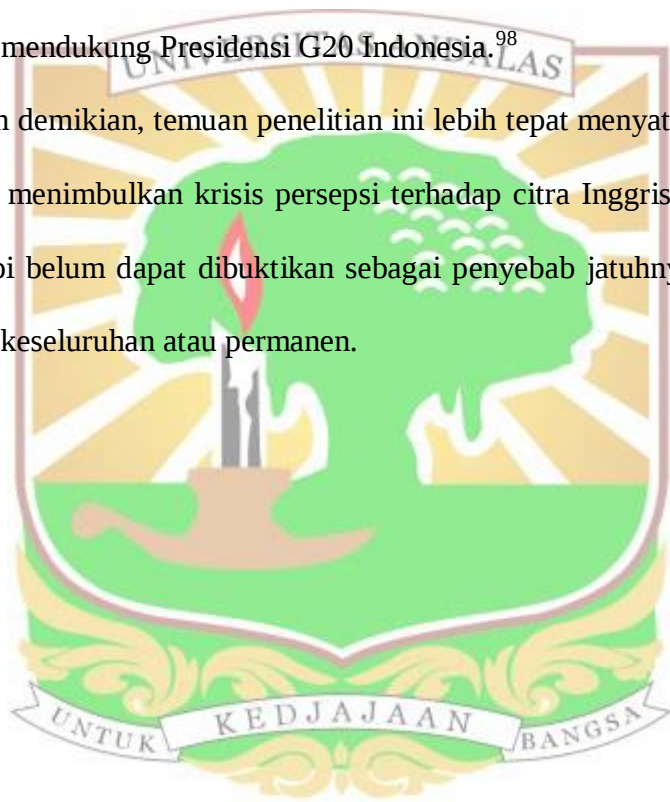
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus All England 2021 memang memberikan tantangan terhadap citra Inggris di Indonesia, terutama pada aspek keadilan, transparansi, dan profesionalisme penyelenggaraan olahraga. Inggris dan institusi terkait kemudian melakukan

⁹⁷ Foreign, Commonwealth & Development Office, "Indonesia-United Kingdom Partnership Forum 2021: Joint Statement," GOV.UK, last modified April 7, 2021, accessed August 18, 2026, <https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement/indonesia-united-kingdom-partnership-forum-2021-joint-statement?>

berbagai upaya melalui komunikasi krisis, penegasan *rule of law*, transparansi institusi, diplomasi olahraga, dan pemeliharaan hubungan bilateral.

Namun, data hubungan Indonesia-Inggris setelah kasus tersebut menunjukkan bahwa kontroversi All England tidak berkembang menjadi kerusakan hubungan bilateral secara struktural. Kerja sama kesehatan, ekonomi, diplomasi, dan perubahan iklim tetap berlangsung. Bahkan pada November 2021, Inggris menyatakan pentingnya membangun *strong strategic partnership* dengan Indonesia dan mendukung Presidensi G20 Indonesia.⁹⁸

Dengan demikian, temuan penelitian ini lebih tepat menyatakan bahwa All England 2021 menimbulkan krisis persepsi terhadap citra Inggris dalam konteks olahraga, tetapi belum dapat dibuktikan sebagai penyebab jatuhnya nation brand Inggris secara keseluruhan atau permanen.



⁹⁸ Prime Minister's Office, 10 Downing Street, "PM Meeting with Indonesian President Joko Widodo: 1 November 2021," *GOV.UK*, last modified November 2021, accessed August 18, 2026, <https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-indonesian-president-joko-widodo-1-november-2021?>